



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan bertambahnya belanja, pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat belas atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5129);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiananya;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
dan
BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 1.186.360.200.536,26 Bertambah sejumlah Rp. 128.008.483.815,71 Sehingga menjadi Rp. 1.314.368.684.351,97 Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula

Rp. 1.107.745.865.468,79

b. Bertambah/(berkurang)

Rp. 117.056.701.640,55

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 1.224.802.567.109,34

2. Belanja

a. Semula		
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. 1.186.223.600.536,26	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 127.840.962.940,71	
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan		Rp. 1.314.064.563.476,97
		Rp. (89.261.996.367,63)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 78.614.335.067,47	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 10.951.782.175,16	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 89.566.117.242,63
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 136.600.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 167.520.875,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 304.120.875,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. (89.261.996.367,63)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 33.004.500.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 7.449.286.310,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 40.453.786.310,00

b. Dana Perimbangan Sejumlah		
1) Semula	Rp. 987.983.272.984,79	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 94.872.370.810,55</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 1.082.855.643.795,34
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah		
1) Semula	Rp. 86.758.092.484,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 14.735.044.520,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp. 101.493.137.004,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 4.850.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 965.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 5.815.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 4.379.200.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 2.769.170.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 7.148.370.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp. 2.750.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 552.000.000,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 3.302.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp. 21.025.300.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 3.163.116.310,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp. 24.188.416.310,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 528.234.098.984,79
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 94.872.370.810,55
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	
b. Dana Alokasi Umum	Rp. 623.106.469.795,34

1) Semula
2) Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan

Rp. 442.557.164.000,00
Rp. - -
Rp. 442.557.164.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 17.192.010.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. - -
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	

Rp. 17.192.010.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. - -
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. - -
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	

Rp. -

b. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp. 47.664.207.004,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. - -
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	

Rp. 47.664.207.004,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 39.093.885.480,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 10.322.044.520,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	

Rp. 49.415.930.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 4.413.000.000,00 -
Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp. 4.413.000.000,00,-
e. Bantuan keuangan dari Pemerintah	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. -
Jumlah Bantuan keuangan dari Pemerintah setelah Perubahan	Rp. -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja-belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 523.993.292.749,89
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 19.309.547.347,71
Jumlah belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 543.302.840.097,60
b. Belanja-belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 662.230.307.786,37
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 108.531.415.593,00
Jumlah belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 770.761.723.379,37

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 426.685.892.749,89
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 11.147.449.847,71
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 437.833.342.597,60

b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. -	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. -
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. -	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp. -
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 44.107.400.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 8.212.097.500,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 52.319.497.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 1.250.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. (50.000.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 1.200.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. -	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. -
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp. 50.450.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. -	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp. 50.450.000.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00,-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. -	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 77.540.788.266,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 6.837.291.375,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 84.378.079.641,00
b. Belanja-belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 249.777.680.303,11
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 30.317.157.712,60</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 280.094.838.015,71
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 334.911.839.217,26
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 71.376.966.505,40</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 406.288.805.722,66

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 78.614.335.067,47
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 10.951.782.175,16</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 89.566.117.242,63
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 136.600.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 167.520.875,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 304.120.875,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu			
1) Semula		Rp. 78.614.335.067,47	
2) Bertambah / (Berkurang)		Rp. 10.951.782.175,16	
Jumlah SiLPA Tahun Lalu setelah Perubahan			Rp. 89.566.117.242,63
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp. -		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. -		
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan			Rp. -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisah			
1) Semula	Rp. -		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. -		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah setelah Perubahan			Rp. -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp. -		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. -		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. -
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) Semula	Rp. -		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. -		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp. -
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp. -		
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. -		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. -	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp. -
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. -	
Jumlah SiLPA Tahun Lalu setelah Perubahan		Rp. -
c. Pembayaran utang		
1) Semula	Rp. 136.600.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 167.520.875,00	
Jumlah Pembayaran utang setelah Perubahan		Rp. 304.120.875,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. -	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, Terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

- | | |
|------------------|---|
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 7 November 2012

BUPATI ROKAN HULU

H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 7 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

D'A M R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2012 NOMOR 6

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Tahun Anggaran 2012

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	33,004,500,000.00	40,453,786,310.00	7,449,286,310.00	22.57
4. 1. 1.	HASIL PAJAK DAERAH	4,850,000,000.00	5,815,000,000.00	965,000,000.00	19.90
4. 1. 2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	4,379,200,000.00	7,148,370,000.00	2,769,170,000.00	63.23
4. 1. 3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	2,750,000,000.00	3,302,000,000.00	552,000,000.00	20.07
4. 1. 4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	21,025,300,000.00	24,188,416,310.00	3,163,116,310.00	15.04
4. 2.	DANA PERIMBANGAN	987,983,272,984.79	1,082,855,643,795.34	94,872,370,810.55	9.60
4. 2. 1.	BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	528,234,098,984.79	623,106,469,795.34	94,872,370,810.55	17.96
4. 2. 2.	DANA ALOKASI UMUM	442,557,164,000.00	442,557,164,000.00	0	0
4. 2. 3.	DANA ALOKASI KHUSUS	17,192,010,000.00	17,192,010,000.00	0	0
4. 3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	86,758,092,484.00	101,493,137,004.00	14,735,044,520.00	16.98
4. 3. 3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	47,664,207,004.00	47,664,207,004.00	0	0
4. 3. 4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	39,093,885,480.00	49,415,930,000.00	10,322,044,520.00	26.40
4. 3. 5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0	4,413,000,000.00	4,413,000,000.00	0
	Jumlah	1,107,745,865,468.79	1,224,802,567,109.34	117,056,701,640.55	10.57
5.	BELANJA				
5. 1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	523,993,292,749.89	543,137,840,097.60	19,144,547,347.71	3.65
5. 1. 1.	BELANJA PEGAWAI	426,685,892,749.89	437,668,342,597.60	10,982,449,847.71	2.57
5. 1. 4.	BELANJA HIBAH	44,107,400,000.00	52,319,497,500.00	8,212,097,500.00	18.62
5. 1. 5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1,250,000,000.00	1,200,000,000.00	(50,000,000.00)	(4.00)
5. 1. 7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA , PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	50,450,000,000.00	50,450,000,000.00	0	0
5. 1. 8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0	0
5. 2.	BELANJA LANGSUNG	662,230,307,786.37	770,926,723,379.37	108,696,415,593.00	16.41
5. 2. 1.	BELANJA PEGAWAI	77,540,788,266.00	84,378,079,641.00	6,837,291,375.00	8.82
5. 2. 2.	BELANJA BARANG DAN JASA	249,777,680,303.11	280,217,838,015.71	30,440,157,712.60	12.19
5. 2. 3.	BELANJA MODAL	334,911,839,217.26	406,330,805,722.66	71,418,966,505.40	21.32
	Jumlah	1,186,223,600,536.26	1,314,064,563,476.97	127,840,962,940.71	10.78
	Surplus / (Defisit)	(78,477,735,067.47)	(89,261,996,367.63)	(10,784,261,300.16)	13.74
6.	PEMBIAYAAN				
6. 1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	78,614,335,067.47	89,566,117,242.63	10,951,782,175.16	13.93
6. 1. 7.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	78,614,335,067.47	89,566,117,242.63	10,951,782,175.16	13.93
	Jumlah	78,614,335,067.47	89,566,117,242.63	10,951,782,175.16	13.93
6. 2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	136,600,000.00	304,120,875.00	167,520,875.00	122.64
6. 2. 5.	PEMBAYARAN UTANG	136,600,000.00	304,120,875.00	167,520,875.00	122.64
	Jumlah	136,600,000.00	304,120,875.00	167,520,875.00	122.64
	Pembiayaan neto	78,477,735,067.47	89,261,996,367.63	10,784,261,300.16	13.74
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)		0	0	0	0

Pasir Pengaraian, 07 November 2012
 Bupati ROKAN HULU 

(Drs. H. ACHMAD M.Si)

kode	Urusan Pemerintah Daerah	Belanja												Bertambah / (Berkurang)		
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Berkurang/ (Bertambah)		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
		Rp		Rp		Rp	%	Tidak Langsung	Langsung	Rp		Tidak Langsung	Langsung		Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14			
2. 07.	INDUSTRI	0	0	0	0	0	316,323,500.00	316,323,500.00	0	474,323,500.00	474,323,500.00	158,000,000.00	49.95			
1. 15.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0	0	0	316,323,500.00	316,323,500.00	0	474,323,500.00	474,323,500.00	158,000,000.00	49.95			
2. 08.	KETRANSMIGRASIAN	0	0	0	0	0	228,378,000.00	228,378,000.00	0	228,378,000.00	228,378,000.00	0	0			
1. 13.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	0	0	0	228,378,000.00	228,378,000.00	0	228,378,000.00	228,378,000.00	0	0			
Jumlah		1,107,745,865,468.79	1,224,802,567,109.34	117,056,701,640.55	10.57	523,993,292,749.89	662,230,307,786.37	1,186,223,600,536.26	543,137,840,097.60	770,926,723,379.37	1,314,064,563,476.97	127,840,962,940.71	10.78			
SURPLUS / (DEFISIT)		(78,477,735,067.47)														
PEMBIAYAAN																
kode	Urusan Pemerintah Daerah	Penerimaan				Pengeluaran				Pembiayaan NETTO		SILPA TAB				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%							
1.	URUSAN WAJIB	78,614,335,067.47	89,566,117,242.63	10,951,782,175.16	13.93	136,600,000.00	304,120,875.00	167,520,875.00	122.64	89,261,996,367.63		0				
1. 20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	78,614,335,067.47	89,566,117,242.63	10,951,782,175.16	13.93	136,600,000.00	304,120,875.00	167,520,875.00	122.64	89,261,996,367.63						
1. 20.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset	78,614,335,067.47	89,566,117,242.63	10,951,782,175.16	13.93	136,600,000.00	304,120,875.00	167,520,875.00	122.64	89,261,996,367.63						

Pasir Pengaraian, 07 November 2012

Bupati ROKAN HULU

(Drs. H. ACHMAD M.Si)

Kode Rekening										Uraian		Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Dasar Hukum
												Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1										2		3	4	5=4-3	6	7
2.05.2.05.01.01.20.	5.	2.	1.	BELANJA PEGAWAI								534,600,000.00	540,600,000.00	6,000,000.00	1.12	
2.05.2.05.01.02.23.				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan								140,608,500.00	243,648,500.00	103,040,000.00	73.28	
2.05.2.05.01.02.23.	5.	2.	2.	BELANJA BARANG DAN JASA								35,273,500.00	48,773,500.00	13,500,000.00	38.27	
2.05.2.05.01.02.24.				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								35,273,500.00	48,773,500.00	13,500,000.00	38.27	
2.05.2.05.01.02.24.	5.	2.	2.	BELANJA BARANG DAN JASA								94,010,000.00	174,050,000.00	80,040,000.00	85.14	
2.05.2.05.01.02.28.				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor								11,325,000.00	20,825,000.00	9,500,000.00	83.89	
2.05.2.05.01.06.	5.	2.	2.	BELANJA BARANG DAN JASA								11,325,000.00	20,825,000.00	9,500,000.00	83.89	
2.05.2.05.01.06.01.				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								7,500,000.00	7,500,000.00	0	0	
2.05.2.05.01.06.01.				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								7,500,000.00	7,500,000.00	0	0	
2.05.2.05.01.06.01.	5.	2.	2.	BELANJA BARANG DAN JASA								7,500,000.00	7,500,000.00	0	0	
2.05.2.05.01.20.				Program Pengembangan Budidaya Perikanan								3,036,202,750.00	3,052,002,750.00	15,800,000.00	0.52	
2.05.2.05.01.20.01.				Pengembangan bibit ikan unggul								413,509,000.00	429,309,000.00	15,800,000.00	3.82	
2.05.2.05.01.20.01.	5.	2.	2.	BELANJA BARANG DAN JASA								395,504,000.00	411,304,000.00	15,800,000.00	3.99	
2.05.2.05.01.20.01.	5.	2.	3.	BELANJA MODAL								18,005,000.00	18,005,000.00	0	0	
2.05.2.05.01.20.02.				Pendampingan pada kelompok tani pembudidayaan ikan								290,667,750.00	290,667,750.00	0	0	
2.05.2.05.01.20.02.	5.	2.	2.	BELANJA BARANG DAN JASA								290,667,750.00	290,667,750.00	0	0	
2.05.2.05.01.20.04.				Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya								2,332,026,000.00	2,332,026,000.00	0	0	
2.05.2.05.01.20.04.	5.	2.	2.	BELANJA BARANG DAN JASA								2,039,450,000.00	2,039,450,000.00	0	0	
2.05.2.05.01.20.04.	5.	2.	3.	BELANJA MODAL								292,576,000.00	292,576,000.00	0	0	
2.05.2.05.01.23.				Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan								40,523,000.00	318,988,000.00	278,465,000.00	687.18	
2.05.2.05.01.23.02.				Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan Produk Perikanan dan Peternakan								40,523,000.00	318,988,000.00	278,465,000.00	687.18	
2.05.2.05.01.23.02.	5.	2.	1.	BELANJA PEGAWAI								10,075,000.00	10,075,000.00	0	0	
2.05.2.05.01.23.02.	5.	2.	2.	BELANJA BARANG DAN JASA								30,448,000.00	308,913,000.00	278,465,000.00	914.56	
Jumlah												17,355,548,475.14	18,277,787,174.21	922,238,699.07	5.31	

Pasir Pengaraian, 07 November 2012
) Bupati ROKAN HULU

(Drs. H. ACHMAD M.Si)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				%
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-6
		77,540,788,266.00	249,777,680,303.11	334,911,839,217.26	662,230,307,786.37	84,378,079,641.00	280,217,838,015.71	406,330,805,722.66	770,926,723,379.37	108,696,415,593.00
	TOTAL JUMLAH									16.41

Pasir Pengaraian, 07 November.2012
 Bupati ROKAN HULU

(Drs. H. ACHMAD M.Si)

KODE	URAIAN	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah / (BerKurang)	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
05. 1. 08.	LINGKUNGAN HIDUP	14,671,322,649.05	16,330,911,435.71	1,659,588,786.66	11.31
05. 1. 09.	PERTANAHAN	24,681,243,000.00	25,059,175,000.00	377,932,000.00	1.53
06. 1. 03.	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	302,539,917,274.86	342,163,552,236.65	39,623,634,961.79	13.10
06. 1. 04.	PEKERJAAN UMUM	301,090,456,450.86	340,609,091,412.65	39,518,634,961.79	13.13
07. 1. 02.	PERUMAHAN	1,449,460,824.00	1,554,460,824.00	105,000,000.00	7.24
07. 1. 12.	KESEHATAN	97,382,176,846.96	107,301,450,912.50	9,919,274,065.54	10.19
08. 1. 17.	KESEHATAN	93,110,114,478.43	101,494,288,076.28	8,384,173,597.85	9.00
08. 2. 04.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	4,272,062,368.53	5,807,162,836.22	1,535,100,467.69	35.93
08. 1. 17.	PARIWISATA DAN BUDAYA	6,322,086,975.66	13,278,058,672.14	6,955,971,696.48	110.03
08. 2. 04.	KEBUDAYAAN	5,722,503,463.94	12,029,038,660.42	6,306,535,196.48	110.21
10. 1. 01.	PARIWISATA	599,583,511.72	1,249,020,011.72	649,436,500.00	108.31
10. 1. 18.	PENDIDIKAN	296,904,051,505.92	315,988,946,696.99	19,084,895,191.07	6.43
10. 1. 26.	PENDIDIKAN	292,217,629,095.97	310,965,549,137.97	18,747,920,042.00	6.42
11. 1. 10.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2,608,892,500.00	2,850,642,500.00	241,750,000.00	9.27
11. 1. 13.	PERPUSTAKAAN	2,077,529,909.95	2,172,755,059.02	95,225,149.07	4.58
11. 1. 10.	PERLINDUNGAN SOSIAL	26,052,816,256.42	27,544,906,297.67	1,492,090,041.25	5.73
11. 1. 11.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	16,033,187,666.20	17,240,568,414.41	1,207,380,748.21	7.53
11. 1. 13.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	369,442,000.00	525,892,500.00	156,450,500.00	42.35
11. 1. 13.	SOSIAL	9,650,186,590.22	9,778,445,383.26	128,258,793.04	1.33
JUMLAH TOTAL		1,186,223,600,536.26	1,314,064,563,476.97	127,840,962,940.71	10.78

Masir Pengaraian, 07 November 2012
 Bupati ROKAN HULU

(Drs. H. ACHMAD M.Si)

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2012

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d								
Golongan IV/c		12	1				2	15
Golongan IV/b		11	7	5		83	7	113
Golongan IV/a		6	72	23		637	15	753
JUMLAH GOLONGAN IV		29	80	28		720	24	881
Golongan III/d			68	106		417	17	608
Golongan III/c			16	248		255	45	564
Golongan III/b				176		385	174	735
Golongan III/a				44		626	283	953
JUMLAH GOLONGAN III			84	574		1,683	519	2,860
Golongan II/d						323	123	446
Golongan II/c						702	141	496
Golongan II/b						204	178	425
Golongan II/a						644	604	1,599
JUMLAH GOLONGAN II						1,873	1,046	2,919
Golongan I/d						1	89	90
Golongan I/c								-
Golongan I/b								-
Golongan I/a								-
JUMLAH GOLONGAN I								-
TOTAL	0	29	164	602	0	4276	1678	89 6749

Pasir Pengaraian, 7 November 2012
BUPATI ROKAN HULU

(Drs. H. ACHMAD, M.Si)

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN

No.	Kode	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN n-1		Jumlah Realisasi s.d akhir TA n-1	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA n	
			APBD TA n-1	Perubahan APBD TA n-1		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.			NIHIL				
3.							
dst.							

Pasir Pengaraian, 7 November 2012
BUPATI ROKAN HULU

(Drs. H. ACHMAD, M.Si)

